

BAB II

KONFLIK KEKERASAN SEKSUAL PADA PERANG BOSNIA- HERZEGOVINA DAN PAYUNG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis akan berfokus untuk memberikan beberapa gambaran dalam rangka mendukung proses penelitian. Beberapa sub bab yang penulis jabarkan dalam bab ini diantaranya; Awal mula Konflik Bosnia-Herzegovina. Dalam sub bab ini penulis menggambarkan secara umum bagaimana asal mula konflik dari Bosnia-Herzegovina yang semula merupakan pecahan negara Yugoslavia. Sub bab berikutnya akan menggambarkan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi saat konflik Bosnia-Herzegovina khususnya mengenai pemerkosan.

2.1. Awal mula Konflik Bosnia-Herzegovina

Pada mulanya, tepatnya pada 6 April 1992, Bosnia-Herzegovina resmi diterima masyarakat sekitar Eropa jadi negara merdeka (Malcolm, 1996). Pada saat itu Bosnia-Herzegovina menggunakan sistem pemerintahan demokrasi parlemen. Pusat pemerintahannya terletak di Sarajevo. Bosnia terdapat 2 bagian persekutuan, yakni; Republik Srpska beserta Federasi Bosnia dan Herzegovina (Susilo, 2009). Nama negara diambil dari dua kata, yakni “Bosnia” yang diambil dari nama Sungai Bosnia dan “Herzegovina” yang merupakan nama dari Herzeg Stevano Kasic sang penguasa wilayah tersebut pada abad ke 15 (Mun'im, 1992).

Letak dari Bosnia-Herzegovina sendiri berada di tengah-tengah Semenanjung Balkan. Posisi ini membuat Bosnia di tinggali oleh beberapa etnis

yakni; Muslim Bosnia, Kroasia-Bosnia, serta Serbia Bosnia (Mun'im, 1992). Posisi strategis berdasar geografis ini buat kerajaan di area Bosnia tidak berhenti saling berebut peroleh kekuasaan dan pengaruh. Misalnya, Turki Usmani yang mencoba menguasai wilayah Balkan. Ia mulai berkuasa atas Bosnia selama melebihi empat abad dan selesai akhir hingga 1878 setelah Serbia berhasil mengalahkan Turki (Poesponegoro, 1982).

Adanya pengaruh lama Turki di Bosnia beri banyak pengaruh bagi rakyat Bosnia. Pada akhirnya banyak rakyat tersebut yang memeluk Islam secara sukarela. Tentunya ada kecenderungan bagi penguasa Turki yang lebih memprioritaskan umat muslim di Bosnia, hal ini tentunya ciptakan kecemburuan bagi etnis Serbia Ortodoks hingga berbuah menjadi suatu kebencian yang rentan akan konflik. Serbia selalu berusaha berbagai cara untuk mengusir Turki dari Bosnia. Konflik itu pun kian menimbulkan disintegrasi yang mengakar. Hingga pada akhirnya timbul sebutan “etnis muslim” teruntuk pembeda orang-orang Ortodoks Serbia serta Katolik Kroasia dengan orang Islam (Glenny, 1998). Diskriminasi pun di berlakukan kepada orang-orang Islam Bosnia, Serbia memberikannya istilah “Atrak” yang artinya orang-orang Turki (Mun'im, 1992).

Dampak lainnya juga dirasakan oleh Bosnia ketika Yugoslavia mulai mengalami disintegrasi (Hadi, 1997). Seperti diketahui bahwasanya Yugoslavia memiliki perjalanan yang berubah-ubah mengenai bentuk pemerintahannya. Yugoslavia pernah berbentuk kerajaan dan juga republik. Federal Demokratik Yugoslavia (1943-1946) serta Republik Rakyat Federal Yugoslavia (1946-1992) (Glenny, 1993). Dimana yang menjadi negara bagiannya adalah; Bosnia-

Herzegovina, Serbia, Makedonia, Kroasia, Montenegro, Slovenia, serta terdapat dua daerah khusus pemerintahan sendiri yakni Vojvodina dan Kosovo (Anderson, 1995).

Adanya konflik nasional, ekonomi, dan politik pada 1987 makin membuat cepat hancurnya negara Yugoslavia. Masalah internal yang ada di Yugoslavia ialah sebab utama ialah sebab dasar perpecahan. Jatuhnya komunisme di Eropa Timur mempercepat perpecahan tersebut. Runtuhnya komunis di Uni Soviet bawa dampak sama di Yugoslavia, ialah negara satelit Uni Soviet. Jatuhnya sistem komunis di akhir 1988 sebabkan Yugoslavia terbagi jadi 6 negara, yakni Montenegro, Bosnia, Macedonia, Serbia, Kroasia, Slovenia (Amelia, 2014).

Titik tertinggi buruknya keadaan politik Yugoslavia secara riil diawali dengan seruan proklamasi saat ada negara-negara mengemukakan kemerdekaannya di 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia mengemukakan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan sepihak yang disertai penetapan mata uang sendiri, dan juga membentuk angkatan bersenjata serta penetapan tapal batasan area negaranya (Anderson, 1995). Memisahkan diri dari Slovenia dan Kroasia pada 1991, bisa terbilang cukup lancar. Keduanya bisa hadapi serangan Serbia yang berusaha mencegah perpecahan dengan tujuan pertahanan keutuhan federasi Yugoslavia. Cerita lain Bosnia yang alami kejadian pahit sampai kehilangan ratusan ribu warganya karena peristiwa memisahkan diri yang tidak didapat dukungan Serbia. Saat Bosnia mengambil keputusan untuk memutuskan memisahkan diri, pemerintah republik Bosnia tak pernah memikirkan bahwa Serbia akan menyerang negaranya (Sumartini, 2014).

Keputusan Bosnia untuk memisahkan diri tidak diiringi dengan kemampuan di bidang militer. Alhasil, Bosnia harus menghadapi Serbia dengan usahanya sendiri. Kondisi ini diperburuk karena terdapat perbuatan menolak dari etnik Serbia-Bosnia terkait mengenai percakapan kemerdekaan Bosnia. Saat menghadapi tentara Serbia-Bosnia, Muslim-Bosnia bisa peroleh kemenangan. Peristiwa ini buat etnik Serbia-Bosnia melakukan koordinasi bersama pemerintah terdahulu Yugoslavia yang dikontrol Serbia untuk melakukan penyerangan Bosnia dari arah sudut manapun. Tentara federal yang dulu melakukan penyerangan Kroasia, dipindahkan kembali ke Bosnia-Herzegovina untuk seruan militer (Sumartini, 2014)

Adanya serangan pada beberapa negara bekas Yugoslavia jadi opsi Serbia saat federasi tak lagi bertahan. Perbuatan menyerbu pada Bosnia saat ini terjadi terbilang lebih besar dikarenakan ada kekuatan penggabungan ikatan dari etnik Serbia-Bosnia dengan federasi dulu Yugoslavia yang otoritasnya Serbia. Besaran etnik Serbia di Bosnia beserta penempatan area terbilang cukup bagi Serbia untuk ciptakan hasratnya untuk membentuk kembali Serbia Raya dengan penggabungan federasi dulu Yugoslavia yang tersisa.

Munculnya Serbia Raya lagi tak mendapatkan izin karena ada etnik non-Serbia di area yang diklaim bagian dari area Serbia Raya. Akibatnya pada akhirnya memunculkan wacana pembersihan etnis atau *etnis cleansing* Muslim Bosnia. Hal ini lah yang menjadi penyebab terjadinya Perang Bosnia secara terus-menerus, terlebih saat Bosnia tak punya pertahanan Serbia tetap melakukan penyerangan sehingga bisa melenyapkan keseluruhan etnik Muslim serta bisa kuasai semua area

Bosnia. Tercatat adanya perbuatan pembantaian etnik Muslim Bosnia mencapai 200.000 jiwa. Bahkan angka ini dinilai mampu mengalahkan besaran total korban peristiwa *holocaust* di Perang Dunia II (Ariyani, 2007).

Persoalan di Bosnia dan Herzegovina dimulai dari harapan penduduk Bosnia yang menginginkan untuk memerdekakan diri dari area Serbia. Bosnia ialah bagian area Yugoslavia berjuang untuk memerdekakan diri. Harapan Bosnia ini mendapat tentangan dari penduduk Serbia yang tetap mengharapkan Bosnia jadi area dari negara Serbia. Penyebabnya dikarenakan etnik Serbia ingin untuk kuasai area Bosnia serta bisa menggunakan ketersediaan sumber daya alam (Amelia, 2014).

Perseteruan permasalahan ini sebenarnya ialah persoalan lokal antara masyarakat asli Bosnia yang mengharapkan kemerdekaan yang mutlak negara Bosnia berdasar referendum yang sudah di bahas oleh masyarakat Bosnia. Ini tentunya sangat ditentang oleh etnis Serbia yang ada. Permasalahan pada akhirnya jadi konflik antar etnik Serbia dengan etnik Bosnia yang punya perbedaan banyak khususnya terkait kepercayaan dan keyakinan yang bersinggungan dengan islam. Perseteruan konflik ini pun kian memanas terlebih ada usaha dari etnik Serbia yang mulai peroleh dukungan tentara dan presiden untuk melaksanakan perselisihan dengan etnik Bosnia.

Presiden Serbia, Milosevic menginstruksikan untuk mengirim panglima perang Jenderal Ratko Mladic untuk terjun dan terlibat dalam perseteruan itu (Tim Narasi, 2006). Mladic dipindahkan dari front Kroasia untuk memasuki Bosnia yang memimpin nasionalis dari Serbia. Setelah terjadinya perang antara Kroasia - Serbia,

Kroasia memilih untuk alihkan alat mesin perang serta pula tentaranya ke Bosnia untuk memberi bantuan etnik Kroasia di Bosnia (Sumartini,2014). Presiden Serbia pun memberikan dalih bahwa ia tak memiliki kewenangan untuk memberhentikan konflik antara Serbia-Bosnia. Ia mengemukakan bahwa, bila Bosnia memerdekakan diri sehingga tentara federal berpindah ke Bosnia untuk menghalau adanya pemisahan diri Bosnia dari federasi Yugoslavia. Pada dasarnya ia bukan tidak mungkin untuk menghentikan konflik antar etnis yang terjadi, namun jika ia mengeluarkan suatu kebijakan akan dipandang menguntungkan etnis muslim Bosnia yang ada. Tentunya hal itu merupakan salah satu visi dari Milosevic untuk mendiirikan negara Serbia Raya sebagai ganti dari Yugoslavia yang mendekati kepunahan.

Berdasarkan hal tersebut, Tentara Federal pun awali penyerangannya ke keseluruhan area Bosnia. Pada 8 April tentara federal berhasil kuasai kota Zvornik dan disusul kota Fusta di 18 April serta kota Sarajevo pada 22 April (Mun'im, 1992). Tak hanya itu para tentara tersebut juga melakukan penjarahan-penjarahan ke beberapa rumah yang sudah tidak ditempati. Banyak mayat berjatuhan. Sebagian dari mereka meliputi anak-anak, perempuan, hingga lansia (Silber & Little, 1996).

Karena tidak adanya kesigapan dari militer Bosnia-Herzegovina, membuat etnis muslim Bosnia menjadi pihak yang dirugikan di medan perang. Izetbegovic, selaku presiden Bosnia-Herzegovina mengambil usaha untuk pertahanan Bosnia dengan cara mempersenjatai etnik Muslim Bosnia sehingga bisa bertahan diri. Namun karena adanya ketidakseimbangan dalam hal militer pada akhirnya mempengaruhi posisi Bosnia-Herzegovina dalam bargaining powernya di aspek

politik. Etnik Kroasia dulu yang setuju dengan adanya pembuatan federasi Muslim-Kroasia tak lagi beri dukungan ide ini. Etnik Kroasia mengemukakan bahwa dilakukannya kerjasama dengan etnik Muslim yang ada akan mengalami rugi di etniknya. Etnik Muslim juga membutuhkan persatuan dengan Kroasia yang bisa ditinjau baik sisi militer ataupun politis pada rancangan perkuat pertahanan menjaga keberadaan dan keutuhan Bosnia. Namun, Kroasia bukan tak ingin memberi bantuan Muslim Bosnia, tapi malah condong menjalin kerjasama dengan Serbia-Bosnia (Sumartini, 2014).

Keadaan melemahnya Muslim Bosnia karena kehilangan sekutunya Kroasia, makin memburuk karena adanya perpecahan di etnik Muslim sendiri. Berdasar pelaporan yang didapat dari kantor berita Bosnia, Reuters sudah jadi bertentangan antar sesama Muslim Bosnia yang tewaskan 15 orang di Bihac (Rohadian, 1993). Bentrok ini didalangi oleh FriketAbdic yang mengemukakan pemberontakan pada pemerintahan Alija Izetbegovic. Pemberontakan Abdic didasari perasaan kecewa pada tindakan Presiden Alija Izetbegovic yang mengharuskan adanya tuntutan perluasan area Bosnia dari penawaran sebelumnya di perundingan yang sebabkan rakyat jadi korban (Rohadian, 1993). Abdic mengemukakan pemerintahan sendiri di Provinsi Bihac dan penetapan diri jadi presiden Provinsi Otonomi Bosnia Barat (*Autonomous Province of Western Bosnia*) (Nadif & Astrid, 2011). Perilaku ini mendapat pertentangan keras orang-orang Muslim Bosnia yang dipimpin Alija. Alija memilih mengirim kelompok prajurit bertujuan untuk menghentikan adanya aksi Abdic di barat Bosnia (Sumartini, 2014).

Adanya perpecahan yang dirasakan Bosnia ini ternyata jadi untung bagi kelompok tempur Serbia sendiri. Pada Mei 1992 Tentara Federal mengemukakan mereka sedang undur diri dari Bosnia. Ada juga yang ditarik ke Serbia, tapi kebanyakan hanya perubahan tanda pangkatnya jadi Tentara Republik Serbia di Bosnia (Taufiqulhadi, 1994). Kelompo prajurit Serbia makin dimudahkan dan bebas taklukkan Bosnia yang mendekati tak lagi ada pertahanan. RadovanKaradzic berkata, “Kita menguasai semuanya. Kini kita menguasai 70% area Bosnia, yang kita butuhkan hanya perundingan” (Gaban & Uchrowi, 1993).

2.2. Upaya *Etnic Cleansing* dan Pemerksaan saat Perang Bosnia-Herzegovina

Seperti diketahui bersama bahwa Bosnia-Herzegovina merupakan wilayah yang masyarakatnya multietnis. Namun sebanyak 31 % nya merupakan etnis Serbia yang memang sangat kental dengan ideologi nasionalisme Serbia Raya yang jaya lagi oleh Milosevic (Walgito, 2001). Ditambah lagi Miloseic melakukan propaganda kepada etnis Serbia-Bosnia agar etnis tersebut terlibat dalam perwujudan cita-cita untuk membentuk Serbia Raya dari reruntuhan Yugoslavia. Negara ini meliputi Serbia dan Montenegro yang mengemukakan diri jadi federasi Yugoslavia yang baru di 27 April 1992 (Malcolm, 1996), lalu penambahan area-area lewat aneksasi dari separuhnya area Kroasia dan Bosnia yang ditempati etnik Serbia.

Kekuatan militer yang mengungguli JNA jadi modal utama Serbia untuk melaksanakan aksinya pembersihan etnis gagasannya. Keunggulan kelompok militer suatu etnik di daerah tertentu bisa buat kehidupan golongan etnik lemah

karena adanya perasaan takut. Tindakan yang mudah untuk dilakukan yakni dengan peneroran masa sampai munculnya perasaan takut ialah dengan tindakan kekerasan, bisa secara terbuka ataupun tersembunyi. Makin tinggi perasaan takut bisa buat orang-orang ini memutuskan keluar dari rumahnya. Rasa takut dan benci yang didapatkan dari kejahanya suatu persoalan jadi dasar sebuah lingkaran setan. Pada kenyataannya, pembersihan etnik ialah produk dari cara kerja kehilangan rasa sadar sehingga membuat diri untuk melalaikan semua kendali pikiran logis pada manusia (Weingartner, 1994).

Salah satu ciri-ciri yang ada dari wacana pembersihan etnis ini ialah adanya penyisihan secara sistematis dari tokoh masyarakat mulai dari kaum terpelajar hingga kaum konlomerat. Jika dilihat dari kronologisnya, pembersihan etnis ini diawali dengan pengepungan desa tertentu yang kemudian, berkembang hingga menjadi penutupan akses keluar masuk wilayah yang dijadikan sasaran operasi. Semua penduduk desa ini diminta untuk keluar kemudian dikumpulkan lalu militer Serbia melucuti senjata kaum Muslim. Kelompok wanita dan anak-anak terpisah dari kelompok laki-laki. Wanita dan anak-anak mendapat izin untuk meninggalkan setelah berbagai barang berharga kepunyaannya diambil paksa, lalu kelompok laki-laki dibawa untuk masuk ke kamp konsentrasi yang sudah diadakan etnik Serbia (Silber & Little, 1996).

Sebagian kamp konsentrasi yang ada mengawali operasi semenjak perang yang makin berkecamuk pada Juni 1992. Setidaknya ditemukan 170 kamp di seluruh Bosnia (Sendjaja, 1992). Pada awalnya kamp-kamp pemusatan ini ialah rumah penduduk, gedung pertemuan hingga gudang pertanian yang saat ini beralih

fungsi. Kamp ini tidak dibuat hanya oleh pihak Serbia tapi etnik Kroasia-Bosnia dan etnik Muslim-Bosnia pula. Kamp tawanan yang dibuat etnis Kroasia dan Muslim punya tujuan untuk melakukan pertukaran tawanan, beda dengan kamp pemusatan Serbia yang berguna untuk penghapusan sistematis pada etnis Muslim. Keadaan kamp etnik Kroasia dan Muslim ini lebih baik bisa dibanding dengan kamp pemusatan Serbia. Jumlah tahanan etnik Kroasia dan Muslim yang relatif tidak pernah mendapat perlakuan tak baik. Lalu tahanan etnik Serbia yang mayoritas etnik Muslim sering mendapat perlakuan tak wajar. Tubuhnya kurus kering dengan tulang-belulang yang menonjol dikarenakan tidak dapat suplai makanan yang cukup (Sendjaja, 1992).

Setidaknya ada dua kamp besar yang digunakan untuk menahan para tahanan etnis muslim Bosnia yakni kamp Omarska dan kamp Trnopolje. Tentunya ada beberapa perlakuan yang diperlakukan ke para tahanan yang ada. Setiap paginya mereka dimintta untuk berjemur dengan bertelanjang dada lalu dipaksa untuk berlarian (ST, 1992). Kemudian digiring disertai bentakan dan todongan senjata saat ke arah kantin untuk memakan jatah makannya yang berisikan sup, potongan daging kecil, serta seiris roti. Jatah ini diperoleh satu kali sehari. Sehingga tak kaget bila tubuh tahanan jadi kurus. Hal ini tak ada apanya bila dibandingkan dengan perolehan siksaan yang diterima. Terdapat seorang tahanan yang dipotong telinganya (Taufiqulhadi, 1994). Ada pula yang dipukuli tiap hari bahkan sampai mati. Mayatnya dibiarkan tergeletak begitu saja sampai berjam-jam lamanya. Ada juga yang jari-jari para tahanan dipenggal satu persatu (Gaban & Uchrowi, 1993).

Eksekusi pada jumlah besar juga dilaksanakan dengan mengangkut orang-

orang Muslim Bosnia dari kamp pemusatan ke sekitar lereng dengan truk. Tiba di sana, mereka langsung ditembak di dalam truk. Mayatnya ditaruh ke jurang di area lokasi setempat. Tindakan eksekusi dalam jumlah besar umumnya dilaksanakan karena tindakan balasan dari terbunuhnya orang Serbia pada perang (Taufiqulhadi, 1994). Tentunya kaum perempuan pun juga mendapatkan perlakuan yang kejam. Mereka dipaksa jadi budak nafsu para tentara tidak dikenal. Pemerksosaan terjadi tak cukup dilakukan orang Serbia, tapi juga orang Bosnia dan Kroasia pada etnik rivalnya saat perang tersebut (FS, 1993). Namun jumlah dilakukannya kasus pemerksosaan oleh orang Bosnia dan Kroasia dibilang lebih kecil dibanding Serbia. Pemerksosaan pasukan Serbia pada wanita Muslim ialah kegiatan sistematis secara terorganisir yang punya tujuan membuat kacau garis keturunan mereka. Seorang wanita diperksosa bergantian oleh tiga sampai belasan laki-laki. Berdasar Serbia, pemerksosaan pada wanita Muslim seakan-akan seperti suatu perintah suci. Orang Serbia yang melakukan pemerksosaan pada umumnya punya penampilan klimis dan rapi, semuanya bertato slogan “4 huruf S” pada bagian lengan, yakni inisial yang bertujuan melakukan hal keji pada Bosnia (Taufiqulhadi, 1994).

Serbia sediakan tempat sendiri digunakan untuk memperksosa para sandera wanita Muslim, ada sekitar 17 kamp pemerksosaan di seantero Bosnia (FS, 1993). Kamp-kamp ini ialah dulunya bekas gudang penyimpanan persediaan makanan, serta asrama mahasiswa, dan juga yang dulunya rumah pemuka Muslim. Korban sulit untuk melarikan diri jika wanita belum diketahui sudah hamil dan mereka dipantau ketat serta kematian bisa kapan saja menghampiri bila para wanita ini melakukan percobaan kabur. Wanita yang perutnya terlihat mulai besar baru bisa

diizinkan untuk dibebaskan pergi dari kamp tersebut (Taufiqulhadi, 1994).

2.3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

HHI merupakan sebuah pedoman yang memiliki tujuan sebagai dasar pendorong kemanusiaan dan untuk memberi batasan dampak konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional (HHI) bermaksud agar dalam konflik yang sedang berlangsung dapat membatasi cara dan metode peperangan tersebut (International Committee of The Red Cross, 2004). J.G Starke berpendapat bahwa di suatu konflik bersenjata, berbagai pihak yang terlibat dalam perang terbagi menjadi dua status yaitu satu kelompok memiliki status jadi kombatan sera memiliki hak untuk ikut perang. Sedangkan kelompok yang lain adalah non kombatan atau *civilian* yang tidak diperbolehkan untuk ikut ke dalam perang dan harus dilindungi serta tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai korban atau sasaran dalam perang (Starke, 2012). HHI tertuang dalam empat Konvensi Jenewa 1949 dan hampir semua Negara setuju untuk terikat oleh konvensi tersebut. Konvensi tersebut telah dikembangkan dan dilengkapi dengan dua perjanjian lebih lanjut: Protokol Tambahan tahun 1977 yang berhubungan dengan perlindungan korban konflik bersenjata (International Committee of The Red Cross, 2004).

HHI yang dikenal serta dipelajari saat ini ialah salah satu cabang (b) dari hukum internasional. Dengan kata lain Hukum Humaniter ialah bagian dari hukum internasional. Sebab itu, spesifikasi Hukum Humaniter tak punya perbedaan dengan hukum internasional, contohnya berhubungan dengan asal hukum yang juga berpedoman di Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, melingkupi: perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip umum hukum,

yurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahli yang diakui reputasinya (Haryomataram, 1994).

HHI ialah instrumen kebijakan serta aturan teknis yang bisa dipergunakan seluruh pihak internasional untuk atasi adanya isu internasional terkait kerugian dan korban perang. Adanya tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan korban perang memang tidak cukup dengan membagi makanan dan obat-obatan, namun juga membutuhkan usaha memberi peringatan pihak yang turut serta berperang sehingga operasi tempurnya dilakukan pada batasan perikemanusiaan. Hal ini bisa dilaksanakan bila pihak-pihak yang berkaitan menghormati dan mengimpementasikan praktik Hukum HHI, karena pada HHI tertuang pedoman peraturan perlindungan korban konflik serta pembatasan alat dan tata cara melakukan perang (Ambarwati, 2010). Ada perjanjian-perjanjian yang tertuang terkait pelarangan pemakaian senjata dan taktik militer serta melindungi orang dan barang tertentu, yakni (International Committee of The Red Cross, 2004) :

1. *The 1954 Convention for The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, plus its two protocols*
2. *The 1972 Biological Weapons Convention*
3. *The 1980 Conventional Weapons Convention and its protocols*
4. *The 1993 Chemical Weapons Convention*
5. *The 1997 Ottawa Convention on Anti-Personnel Mines*

HHI membedakan antara perselisihan bersenjata non internasional dan internasional. Perselisihan bersenjata non internasional hanya terjadi melibatkan negara itu sendiri yang meliputi angkatan bersenjata reguler yang melawan

kelompok pemberontak lainnya. Aturan yang berlaku untuk mengatur konflik bersenjata non internasional ditetapkan pada pasal 3 umum untuk empat Konvensi Jenewa serta dalam Protokol Tambahan II. Sedangkan terjadinya konflik bersenjata internasional antara dua negara dan mereka harus patuh terhadap berbagai aturan termasuk yang ada di Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I (International Committee of The Red Cross, 2004).

Terdapat asas-asas HHI yaitu (Ambarwati, 2010):

- a. **Asas Kemanusiaan**, dimana asas ini melarang untuk penggunaan seluruh macam tingkat kekerasan yang tak dibutuhkan untuk capai maksud perang, para korban dan yang sudah jadi tawanan perang tak lagi dijadikan sebagai ancaman, oleh sebab itu mereka harus dilindungi dan dirawat.
- b. **Asas Kepentingan Militer**, dalam asas ini mengatur hak dari pihak yang sedang melakukan perang untuk menentukan kekuatan yang dibutuhkan untuk taklukkan musuh dalam waktu yang singkat dengan biaya rendah dan korban yang sedikit-dikitnya.
- c. **Asas *Chilvary***, asas ini tidak memperbolehkan penggunaan peralatan senjata dan cara berperang yang tak terhormat.

2.4. Upaya Pemerintah Bosnia dalam Mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional

Meskipun belum meratifikasi Konvensi Jenewa beserta protokol-protoklnya, Pemerintah Bosnia sebenarnya telah menerapkan nilai-nilai dan konsep HHI dalam tindakan yang mereka lakukan. Penerapan dan implementasi konsep HHI yang dilakukan oleh Serbia dicerminkan melalui adanya kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disepakati oleh Pemerintah Bosnia-Herzegovina, Partai Demokratik Serbia (*Serbian Democratic Party*), dan Komunitas Demokratik Kroasia (*Croatian Democratic Community*). Kesepakatan yang dilakukan pada 22 Mei 1992 tersebut membahas secara spesifik mengenai aspek-aspek yang terkait dengan aplikasi dan implementasi hukum humaniter internasional dalam konteks konflik di Bosnia-Herzegovina sekaligus mencari solusi terkait masalah kemanusiaan yang terjadi di Bosnia-Herzegovina (Mercier, 1995). Kesepakatan yang disepakati di Jenewa tersebut setidaknya memuat beberapa hal yang terkait dengan perlindungan terhadap warga sipil, rumah sakit dan unit-unit medis, kombatan yang tertangkap, dan persoalan-persoalan teknis lainnya yang memberikan akses dukungan terhadap aplikasi dan implementasi HHI dalam konflik di Bosnia-Herzegovina. Lebih spesifik, kesepakatan ini dibentuk untuk memastikan komitmen seluruh pihak yang bertikai, untuk menjunjung tinggi dan menghargai pasal 3 Konvensi Jenewa yang terkait dengan perlindungan terhadap tawanan kombatan (*captured combatants*) (Sivakumaran, 2011).

Selain kesepakatan terkait perlindungan terhadap tawanan kombatan,

Pemerintah Bosnia juga melakukan kesepakatan lain terkait diseminasi HHI dan adanya penasihat hukum terkait aplikasi dan implementasi HHI dalam konflik Bosnia. Kesepakatan yang juga disepakati pada 22 Mei 1992 tersebut menyepakati beberapa poin terkait diseminasi dan promosi pengetahuan terkait hukum humaniter internasional dengan: (1) menyediakan instruksi dan pembelajaran terkait HHI kepada seluruh unit di bawah komando, kontrol, dan pengaruh politik pemerintah; (2) memfasilitasi diseminasi himbauan-himbauan yang diberikan oleh ICRC terkait HHI; (3) mendistribusikan publikasi yang dilakukan oleh ICRC. Selain diseminasi terkait HHI, kesepakatan tersebut juga berisi mengenai penunjukkan penasihat hukum yang secara spesifik bertanggung jawab sebagai “konsultan” hukum bagi pihak-pihak yang bertikai untuk berkonsultasi terkait pedoman yang telah ada dan disepakati bersama di dalam Konvensi Jenewa, protokol-protokol dalam Konvensi Jenewa, HHI, dan kesepakatan antar-negara yang bertikai (Carmen, Hunter, Kyle, Woolridge, & Molly, n.d.).

Dalam implementasi di tingkat lokal dalam konflik Bosnia, Pemerintah Bosnia melalui berbagai otoritas juga ikut terlibat dalam upaya untuk memastikan aplikasi dan implementasi HHI. Pemerintah Bosnia melalui Presiden Bosnia pada saat itu, Alija Izetbegovic, melibatkan beberapa otoritas dalam pemerintahannya untuk secara spesifik mengatasi isu-isu humaniter. Isu-isu humaniter terkait Pemerintah Bosnia dalam konflik tersebut sebagian besar ditangani oleh Presiden Komite Negara untuk Kerjasama PBB (*President of the State Committee for Co-operation with the UN*) dan Kementerian Pengungsi dan Kesejahteraan Sosial (*Ministry of Refugees and Social Welfare*) (Cutts, 1999). Pada 31 Desember 1992,

Pemerintah Bosnia meratifikasi Konvensi Jenewa dan protokol-protokol yang ada.

Pada Bulan Oktober 1995, satu bulan sebelum disepakatinya Perjanjian Dayton yang mengakhiri Perang Bosnia pada November 1995, Pemerintah Bosnia melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan pihak-pihak yang bertikai di mana kesepakatan tersebut berlaku efektif pada tanggal 10 Oktober 1995 hingga kesepakatan perdamaian dibentuk. Kesepakatan gencatan senjata tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Bosnia di bawah kepemimpinan Presiden Izetbegovic untuk menjunjung tinggi HHI di mana salah satu tujuan dari gencatan senjata ini adalah juga untuk mengatur terkait perlakuan terhadap tahanan (*prisoners treatment*) dan pertukaran tahanan (*exchange of prisoners*) (United Nations, 1995).